



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2018-2023
REVISI I**



**DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KENDARI, JUNI 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami haturkan kehadapan Allah SWT Tuhan yang maha rahman dan rahim yang telah begitu banyak memberikan curahan dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga Revisi I Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 dapat diselesaikan.

Perubahan Renstra Revisi I ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai unit kerja perencanaan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu Perubahan Renstra Revisi I ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan yang akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam menyusun laporan kinerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pemikiran dalam penyusunan Perubahan Renstra Revisi I ini diucapkan terima kasih semoga dokumen Perubahan Renstra Revisi I ini bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023 dapat terwujud.

Kendari, Juni 2022

Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Tenggara



LA HARUNA, S.P., M.Si.
NIP. 19721231 200212 1 026



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	21
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	24
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	26
3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.5. Penentuan isu-isu strategis	28
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	35



BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	41
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB VIII. PENUTUP	64



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara menurut golongan Tahun 2021.....	11
Tabel 2.2 Komposisi ASN Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021.....	11
Tabel 2.3 Aset Barang Milik Dinas Perkebunan dan Hortikultura yang diperoleh dari Dana APBN	12
Tabel 2.4 Aset Barang Milik Dinas Perkebunan dan Hortikultura yang diperoleh dari Dana APBD	12
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.....	14
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.....	16
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra Tahun 2018-2023.....	35
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Pro Sultra.....	35
Tabel 6.1 Rencana program dan kegiatan prioritas daerah 2021-2023.....	42
Tabel 7.1 Kinerja penyelenggaraan bidang urusan.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis di tingkat unit kerja merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan nasional sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 150.

Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Dokumen Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perkebunan dan Hortikultura adalah derivasi dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Pemerintah Daerah yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD dan Renstra Kementerian Pertanian RI.

Proses pelaksanaan penyusunan perubahan Rencana Strategis Revisi I sebagai berikut: Persiapan penyusunan; Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan; Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah; Perumusan rancangan akhir; dan Penetapan Renstra. Renstra OPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja OPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Renstra OPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja OPD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).



Perubahan Renstra Revisi I Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19), perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan perubahan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Serta Perubahan Peraturan Kebijakan Nasional,dan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Revisi I Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategi OPD Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease Virus 2019 (Covid-19);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus;
 6. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



10. Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah (Perda) No. 9 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.
13. Peraturan Gubernur Sultra Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja UPTD Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Revisi I Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023 adalah sebagai pedoman untuk memberikan dasar kebijakan teknis strategis Pembangunan Perkebunan dan Hortikultura dalam menentukan prioritas pelayanan melalui program dan kegiatan yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam kerangka pencapaian visi dan misi sebagai tolak ukur pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perkebunan dan hortikultura (Program dan Anggaran) pada setiap akhir tahun anggaran.



Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 - 2023 dalam menentukan prioritas pelayanan dan kegiatan tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, adalah :

- Mewujudkan Sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi dan Renstra Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pencapaian visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Hortikultura dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Menjadi pedoman untuk kemudahan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, serta evaluasi kegiatan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Menjadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun.
- Sebagai bahan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) terkait pelaksanaan pembangunan bidang Perkebunan dan Hortikultura.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Revisi I Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023, disusun melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I. **Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. **Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara**, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan



serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.

- BAB III. **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara**, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Tenggara, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara, telaahan Renstra kementerian dan lembaga serta penentuan isu-isu strategis Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.
- BAB IV. **Tujuan dan Sasaran**, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.
- BAB V **Strategi dan Arah Kebijakan**, berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI. **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII. **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, mengemukakan indikator kinerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.
- BAB VIII. **Penutup**, berisi ringkasan perubahan renstra revisi I serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Dinas Perkebunan dan Hortikultura Tahun 2018-2023.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara diuraikan bahwa Dinas Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan di sektor pertanian sub sektor perkebunan dan sub sektor hortikultura.

Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan unsur penunjang Urusan Pilihan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok dan fungsi sbb :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan perkebunan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan perkebunan dan hortikultura;
- b. Penyusunan program penyuluhan perkebunan dan hortikultura;
- c. Penataan prasarana perkebunan dan hortikultura
- d. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan dan hortikultura



- e. Pengawasan sarana perkebunan dan hortikultura
- f. Pembinaan produksi dibidang perkebunan dan hortikultura
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman perkebunan dan hortikultura
- h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam,
- i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura;
- j. Penyelenggaraan penyuluhan perkebunan dan hortikultura;
- k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis perkebunan dan hortikultura;
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan hortikultura;
- m. Pelaksanaan administrasi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

2.1.2. Struktur Organisasi OPD

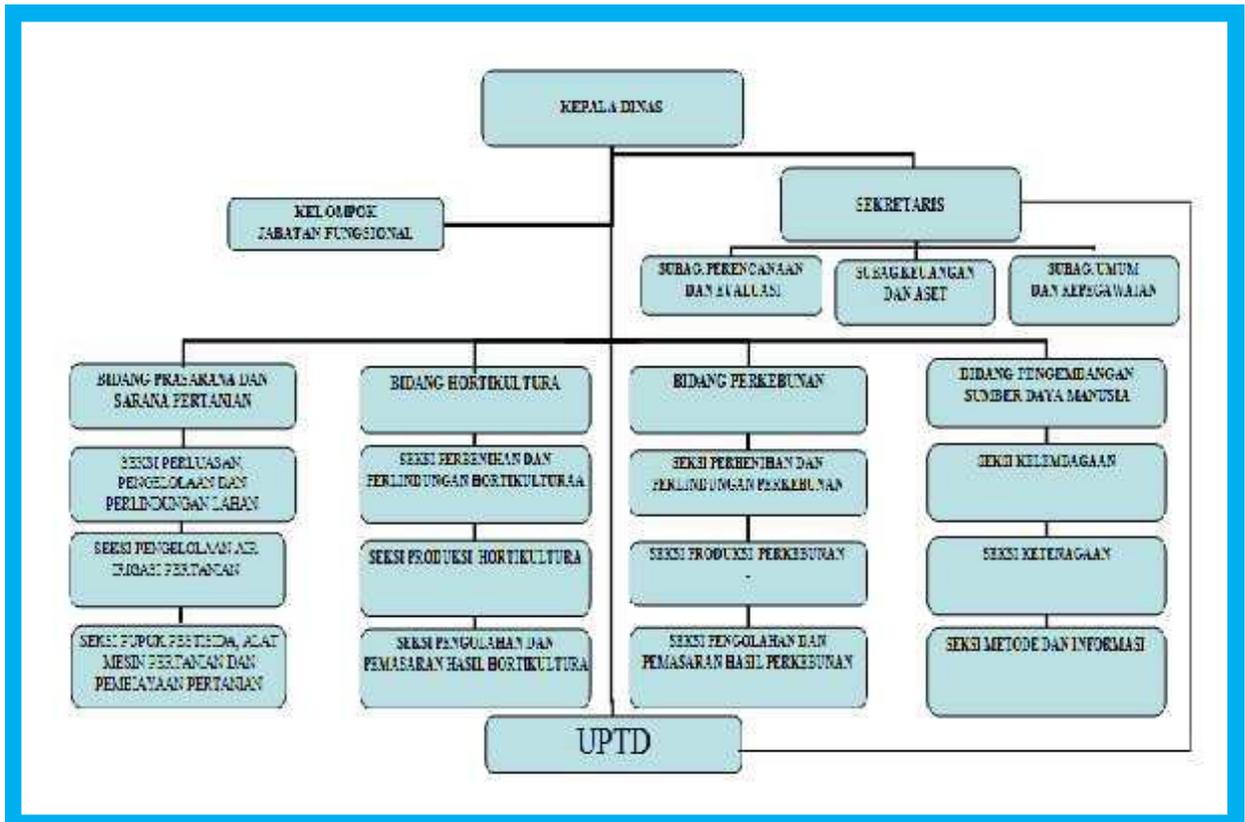
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dibutuhkan dukungan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana yang diharapkan dapat menggerakkan semua fungsi-fungsi manajemen pemerintah bidang perkebunan dan Hortikultura sesuai dengan kewenangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah (Perda) No. 4 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi perangkat Daerah, Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 22 tahun 2017 menetapkan Struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura
- b. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari :
 - Seksi Perluasan dan pengelolaan dan perlindungan lahan;
 - Seksi Pengelolaan Air Irigasi;
 - Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin dan Pembiayaan.
- d. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, terdiri dari :
 - Seksi Ketenagaan;
 - Seksi Kelembagaan;
 - Seksi Metode dan Informasi.
- e. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - Seksi Produksi Perkebunan;
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan.
- f. Bidang Hortikultura, terdiri dari :
 - Seksi Produksi Hortikultura;
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
 - Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perkebunan dan Hortikultura berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 91 Tahun 2017 terdiri dari :
 - UPTD Balai Benih Induk Hortikultura (BBIH);
 - UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura (BPTPH);
 - UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan dan Hortikultura (BPSBPH).
 - UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dukungan sumber daya yang ada diharapkan dapat mendorong kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang/UPTD sebagai satu rangkaian kesatuan yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.



2.2. Sumber Daya OPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara didukung oleh sumber daya aparatur yang ditempatkan di bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2021, pegawai Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara adalah berjumlah 198 orang. Jumlah dan komposisi pegawai Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara menurut golongan Tahun 2021.

No	Status Kepegawaian	Golongan Ruang				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	ASN	17	140	25	-	182
2	Honorar					16
	Jumlah					198

Tabel 2.2. Komposisi ASN Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021.

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata Tiga (S3)	-
2	Strata Dua (S2)	35
3	Strata Satu (S1)	132
4	Diploma (D3)	1
5	SMA/Sederajat	37
6	SMP/Sederajat	2
	Jumlah	198

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Penyediaan perlengkapan kantor dan sarana lainnya sangat diperlukan dalam menunjang kelancaran operasional kegiatan. Barang-barang yang dimiliki sebagai aset Dinas Perkebunan dan Hortikultura jumlahnya cukup tersedia bagi kebutuhan pegawai dalam melaksanakan operasional kegiatannya.

Barang-barang sebagai aset tersebut pengadaannya dikelompokkan dalam dua jenis yaitu : Barang yang diperoleh dari Dana APBN dan barang yang diperoleh dari dana APBD secara jelas disajikan pada Tabel 2.3 dan 2.4.

Tabel 2.3. Aset Barang Milik Dinas Perkebunan dan Hortikultura yang diperoleh dari Dana APBN.

No.	Jenis>Nama Barang	Jumlah (unit)	Lokasi Barang
1.	Tanah	72	8 Kab. & 2 Kota
2.	Bangunan Gedung	152	8 Kab. & 2 Kota
3.	Alat Angkutan		
	- Roda 4	11	Disbun Horti
	- Roda 2	346	8 Kab. & 2 Kota
4.	Barang Inventaris Lainnya	2743	Disbunhorti Provinsi Sultra, UPTD Proteksi, BPSBP, & BBIH Horti

Tabel 2.4. Aset Barang Milik Dinas Perkebunan dan Hortikultura yang diperoleh dari Dana APBD.

No.	Jenis>Nama Barang	Jumlah (unit)	Lokasi Barang
1.	Tanah	25	8 Kab. & 2 Kota
2.	Bangunan Gedung	81	8 Kab. & 2 Kota
3.	Alat Angkutan		
	- Roda 4	4	Disbun Horti
	- Roda 2	30	8 Kab. & 2 Kota
4.	Barang Inventaris Lainnya	2.140	Disbunhorti Provinsi Sultra, UPTD Proteksi, BPSBP, & BBIH Horti

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Sasaran strategis Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung indikator kinerja Kepala Daerah dalam periode 5 tahun (2013-2023) terdiri dari dua sasaran yakni : Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan dan hortikultura; dan Meningkatnya kelembagaan masyarakat petani (LEM Sejahtera).

Secara umum capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke- (Ton)					Realisasi Capaian Tahun Ke- (Ton)					Rasio Capaian Tahun Ke- (%)					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
A	Meningkatnya produktivitas dan mutu tanaman perkebunan dan hortikultura	Jumlah Produksi															
1		Kakao	148.746	154.997	161.248	167.498	173.749	157.537	161.514	133.638	136.477	125.182	106	104	83	81	72
2		Jambu Mete	17.720	21.176	24.632	28.088	31.544	23.758	24.495	26.902	25.366	23.817	134	116	109	90	76
3		Kelapa	42.936	44.349	45.762	74.174	48.587	39.191	41.303	39.979	37.782	39.660	91	93	87	51	82
4		Lada	3.833	4.066	4.300	4.533	4.767	3.858	4.378	4.663	4.394	5.050	101	108	108	97	106
5		Cengkeh	6.500	7.400	8.300	9.200	10.100	6.557	7.891	13.571	13.677	12.862	101	107	164	149	127
6		Rambutan	11.595	12.276	12.957	13.638	14.391	13.493	20.229	11.586	10.067	3.337	116	165	89	74	23
7		Durian	5.170	7.136	9.102	11.068	13.034	6.159	7.652	9.370	2.974	2.528	119	107	103	27	19
8		Bawang Merah	45,70	296,00	546,30	796,50	1.046,80	46	357	344	892	372	100	121	63	112	36
9		Cabe Rawit	4.869	5.642	6.416	7.190	7.963	4.869	6.819	3.592	8.065	3.312	100	121	56	112	42
10	Cabe Besar	2.845	7.989	13.134	18.278	23.422	28.452	3.348	1.798,8	2.586,0	1.206	1.000	42	14	14	5	
B	Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani serta bertambahnya jumlah lembaga Petani (LEM Sejahtera)	Jumlah LEM Sejahtera yang aktif	48	63	79	94	110	48	63	100	108	120	100	100	127	115	109

Tabel 2.5.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD		Target Renstra SKPD Tahun ke- (Ton)						Realisasi Capaian Tahun Ke- (Ton)						Rasio Capaian Tahun Ke- (%)					
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Meningkatkan produktivitas dan mutu tanaman perkebunan dan hortikultura	Jumlah Produksi																		
1		Kakao	130.182	135.182	140.182	128.180	129.180	130.180	122.988	115.023	114.003	107.153			94,47	85,09	81,32	83,60		
2		Jambu Mente	23.818	238.206	23.821	23.822	23.823	23.826	36.923	50.862	52.777	51.698			155,02	21,35	221,56	217,02		
3		Kelapa	39.665	396.709	396.756	39.670	39.674	39.678	39.388	37.528	38.397	39.156			99,31	95,07	117,87	98,70		
4		Cengkeh	12.909	12.956	13.002	12.891	12.901	12.911	5.135	5.718	13.434	9.491			39,78	44,13	103,32	73,63		
5		Lada	8.910	8.913	8.917	5.061	5.065	5.069	13.237	13.420	5.604	5.580			148,56	150,57	62,85	110,25		
6		Kopi				2.673	2.675	2.677				2.776						103,85		
7		Pala				416	419	422				762						183,17		
8		Bawang Merah	475	880	900	521	571	621	491	390	655	1.015			103,37	44,32	72,78	194,82		
9		Cabe Rawit	8.904	9.064	9.224	3.611	3.711	3.811	4.540	3.669	3.801	4.287			50,99	40,48	41,21	118,72		
10		Cabe Besar	5.180	5.430	5.630	1.506	1.606	1.706	1.107	1.408	1.963	2.411			21,37	25,93	34,87	160,09		
11		Jeruk	21.000	21.500	21.700	21.890	21.950	22.100	86.291	27.267	50.214	24.187			410,91	126,82	231,40	110,49		
12	Durian	-	-	-	11.102	11.142	11.092	-	-	-	12.886			-	-	-	116			

a. Kakao

Persentase capaian produksi kakao tahun 2017 sebesar 72% dari target produksi 173.749 ton hanya tercapai 125.182 ton. Sedangkan Persentase capaian produksi kakao tahun 2021 sebesar 83,60% dari target produksi 128.180 ton hanya tercapai 107.153 ton. Tidak tercapainya target kinerja ini disebabkan oleh serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang masih cukup tinggi, alih fungsi lahan dan kebakaran kebun.

b. Jambu Mete

Produksi jambu mete tahun 2017 mencapai 76% dari target yang diharapkan 31.544 ton hanya tercapai 23.817 ton. Produksi jambu mete pada tahun 2017 juga menurun 1.549 ton dari produksi tahun 2016 sebanyak 25.366 ton. Penurunan produksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya cuaca yang ekstrim dan alih fungsi lahan. Jambu mete merupakan tanaman perkebunan yang sangat rentan dengan perubahan cuaca. Kabupaten Muna dan Buton merupakan sentra penghasil jambu mete di Sulawesi Tenggara. Mekarnya dua kabupaten tersebut menjadi Muna Barat, Buton Tengah dan Buton Selatan sangat berdampak pada alih fungsi lahan perkebunan jambu mete menjadi pemukiman.

Produksi jambu mete tahun 2021 mencapai 217,02% dari target yang 23.822 ton dan tercapai 51.698 ton. Produksi jambu mete pada tahun 2021 mengalami penurunan 1079 ton dari produksi tahun 2020 sebanyak 52.777 ton. Penurunan produksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya cuaca yang ekstrim dan alih fungsi lahan. Jambu mete merupakan tanaman perkebunan yang sangat rentan dengan perubahan cuaca. Kabupaten Muna dan Buton merupakan sentra penghasil jambu mete di Sulawesi Tenggara. Mekarnya dua kabupaten tersebut menjadi Muna Barat, Buton Tengah dan Buton Selatan sangat berdampak pada alih fungsi lahan perkebunan jambu mete menjadi pemukiman.

c. Kelapa

Produksi kelapa tahun 2017 sebesar 39.660 ton atau 82% dari target 48.587 ton. Dalam statistik satuan produksi untuk kelapa dihitung berdasarkan berat kopra yang dihasilkan petani sedangkan buah segar tidak dihitung sebagai nilai produksi. Seiring dengan perkembangan daerah, permintaan akan buah segar kelapa semakin tinggi untuk diolah sebagai bahan minimuman, hal ini menurunkan minat petani kelapa dalam mengolah kelapa menjadi kopra.

Produksi kelapa tahun 2021 sebesar 39.156 ton atau 98,70% dari tahun 2020 sebesar 38.397 ton. Mengalami peningkatan produksi dari target yang ditetapkan. Peningkatan produksi disebabkan potensi pengembangan kelapa cukup besar baik dari aspek budaya, ekonomi, maupun dari aspek sosial budaya. Dalam statistik satuan produksi untuk kelapa dihitung berdasarkan berat kopra yang dihasilkan petani, menunjukkan bahwa kebutuhan/permintaan akan kopra makin meningkat disebabkan oleh meningkatnya konsumsi minyak goreng, demikian pula dengan buah segar tidak dihitung sebagai nilai produksi. Seiring dengan perkembangan daerah, permintaan akan buah segar kelapa semakin tinggi untuk diolah sebagai bahan minimuman, hal ini meningkatkan minat petani kelapa dalam mengolah kelapa menjadi kopra maupun dalam kelapa segar.

d. Lada

Produksi lada tahun 2017 mencapai 106% dari target yang ditentukan. Produksi lada tahun 2017 mencapai 5.050 ton dari target yang ditentukan 4.767 ton. Capaian ini sangat didukung oleh partisipasi petani untuk mengolah tanamannya menjadi lebih produktif serta dukungan pemerintah melalui anggaran APBN dialokasikan kegiatan intensifikasi Tanaman lada 100 ha di Kabupaten Konawe Selatan, 200 ha di Konawe dan perluasan lada di Kabupaten Kolaka dan Konawe masing-masing 100 ha.

Produksi lada tahun 2021 mencapai mengalami peningkatan dengan persentase capaian 110,25%. Produksi lada tahun 2021 mencapai 5.580 ton

Capaian ini sangat didukung oleh partisipasi petani untuk mengolah tanamannya menjadi lebih produktif serta dukungan pemerintah melalui anggaran APBN dialokasikan kegiatan intensifikasi tanaman lada 100 ha di Kabupaten Konawe Selatan, 200 ha di Konawe dan perluasan lada di Kabupaten Kolaka dan Konawe masing-masing 100 ha.

e. Cengkeh

Produksi cengkeh tahun 2017 mencapai 127% dari target tahunan 10.100 ton tercapai 12.862 ton. Tingginya produksi cengkeh sangat didukung oleh penyediaan anggaran dari pemerintah pusat. Tahun 2017 dialokasikan kegiatan intensifikasi tanaman cengkeh di Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara masing-masing 100 ha. Perluasan cengkeh di Kabupaten Kolaka 300 ha, Kolaka Utara 250 ha dan Kolaka Timur 210 ha.

Produksi cengkeh tahun 2021 mencapai 73,63% dari target tahunan 12.891 ton tercapai 9.491 ton. Rendahnya produksi cengkeh sangat dipengaruhi oleh adanya pergantian tanaman tua dengan tanaman muda sehingga sebagian tanaman belum berproduksi dan beberapa kegiatan intensifikasi tanaman cengkeh di Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara masing-masing 100 ha. Perluasan cengkeh di Kabupaten Kolaka 300 ha, Kolaka Utara 250 ha dan Kolaka Timur 210 ha.

g. Kopi

Kopi merupakan komoditi perkebunan yang menjadi target Renstra 2021-2023. Target produksi kopi tahun 2021 sebesar 2.673 ton sampai tahun 2023 sebesar 2.677 ton. Dengan rasio capai 103,85% mengalami peningkatan produksi dari target capai tahun 2021 sebesar 2.670 ton tercapai produksi 2.776 ton. Tercapainya target didukung dengan kegiatan pengadaan bibit tanaman kopi melalui kegiatan APBD.

h. Pala

Pala merupakan komoditi perkebunan yang menjadi target Renstra 2018-2023. Target produksi pala tahun 2021 sebesar 416 ton sampai tahun 2023 sebesar 422 ton. Tercapainya target produksi tahun 2021 sebesar 416 ton dan capai produksi sebesar 762 ton. Peningkatan ini seiring

dengan petani mulai membudidayakan tanaman pala dan adanya batuan kegiatan pengadaan bibit tanaman kopi melalui kegiatan APBD.

i. Bawang Merah dan Aneka Cabai

Sejak tahun 2016 bawang merah merupakan komoditi unggulan yang dikembangkan di Sulawesi Tenggara dalam rangka mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan. Dari data statistik produksi bawang merah tahun 2017 adalah 372 ton. Selain bawang merah, cabai rawit dan cabe besar juga termasuk komoditi yang sedang dikembangkan guna mendukung swasembada pangan nasional. Pemerintah melalui anggaran APBN dan APBD sangat mendukung pengembangan aneka cabai. Kawasan aneka cabai di Sulawesi Tenggara tahun 2017 adalah 210 ha yang tersebar di Kabupaten Buton, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe dan Konawe Selatan, dengan produksi cabai rawit 3.312 ton dan cabai besar 1.206 ton.

Sejak tahun 2016 bawang merah merupakan komoditi unggulan yang dikembangkan di Sulawesi Tenggara dalam rangka mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan. Dari data statistik produksi bawang merah tahun 2021 adalah 1.015 ton. Selain bawang merah, cabai rawit dan cabe besar juga termasuk komoditi yang sedang dikembangkan guna mendukung swasembada pangan nasional. Pemerintah melalui anggaran APBN dan APBD sangat mendukung pengembangan aneka cabai. Kawasan aneka cabai di Sulawesi Tenggara tahun 2017 adalah 210 ha yang tersebar di Kabupaten Buton, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe dan Konawe Selatan, dengan produksi cabe rawit 4.287 ton dan cabe besar 2.411 ton.

j. Jeruk

Jeruk merupakan komoditi hortikultura yang menjadi target Rentra 2018-2023 Target produksi jeruk tahun 2021 sebesar 21.890 ton sampai tahun 2023 sebesar 22.100 ton. Target produksi jeruk tahun 2021 sebesar 21.890 ton dan capaiannya 24.187 ton. Tercapainya target produksi jeruk disebabkan oleh cuaca yang mendukung proses produksi tanaman ini.

k. Rambutan dan Durian

Rambutan dan durian merupakan komoditi hortikultura yang menjadi target Renstra 2013-2018 yang rasio capaiannya masing-masing 23% dan 19%. Target produksi rambutan tahun 2017 sebesar 14.391 ton dan capaiannya 3.337 ton. Target produksi durian 13.034 ton dengan produksi 2.528 ton. Tidak tercapainya target produksi rambutan dan durian disebabkan oleh cuaca yang tidak mendukung proses produksi tanaman ini.

Durian merupakan komoditi hortikultura yang menjadi target Renstra 2018-2023 Target produksi durian tahun 2021 sebesar 11.102 ton sampai tahun 2023 sebesar 11.092 ton. Target produksi durian tahun 2021 sebesar 11.102 ton dan capaiannya 12.886 ton dengan persentase capaian 116%. Tercapainya target produksi durian disebabkan oleh cuaca yang mendukung proses produksi tanaman ini.

l. LEM Sejahtera yang Aktif

LEM Sejahtera adalah lembaga ekonomi desa yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat desa dengan pendekatan kearifan lokal, dimana seluruh warga desa menghimpun kekuatan swadaya untuk mendayagunakan potensi sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya. LEM Sejahtera didirikan sejak tahun 2008 dan sampai dengan tahun 2017 telah terbentuk 120 lembaga. Sedangkan LEM Sejahtera tahun 2020 berjumlah 137 lembaga.

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa presentase capaian jumlah LEM yang aktif di tahun 2017 sebesar 109% lembaga dari target 110 lembaga tercapai 120 lembaga. Sejak tahun 2013 pemerintah pusat dan daerah mulai menganggarkan untuk pembentukan dan pembinaan kelembagaan LEM Sejahtera. Tahun 2017 melalui APBD dialokasikan anggaran untuk pembentukan 8 LEM Sejahtera di Kabupaten Konawe, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur dan Muna Barat.

m. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.

TAHUN	DANA APBD		CAPAIAN (%)	Dana APBN (TP)		CAPAIAN (%)
	ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
2013	16.874.725	16.237.555	96	43.016.740	42.574.772	99
2014	20.665.506	19.727.660	95	72.660.886	72.241.718	99
2015	13.360.226	11.447.290	86	308.242.606	294.653.755	96
2016	15.757.295	14.888.261	94	78.532.181	77.237.810	98
2017	9.133.438	8.428.746	92	72.637.926	64.112.789	88
2018	25.774.496.825	24.215.485.019	94	126.869.555.000	117.420.451.675	93
2019	41.210.757.400	38.486.814.707	93	37.857.601.000	32.803.938.358	87
2020	24.057.199.150	23.060.658.166	96	30.907.591.000	29.590.152.050	96
2021	38.858.383.056	36.654.901.317	94,33	17.509.445.000	17.431.025.025	99,55

Pada tabel tersebut menunjukkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan OPD pada Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada setiap tahunnya menunjukkan rata-rata cukup baik yang mencapai rasio 86% sampai 99%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Walaupun memiliki potensi yang besar, pembangunan perkebunan dan hortikultura selama lima tahun terakhir ini dalam pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan terutama terkait dengan teknologi budidaya, kondisi sumber daya alam, ketersediaan prasarana dan sarana produksi, sumberdaya manusia dan kelembagaan. Permasalahan tersebut berasal dari kelemahan, sehingga Permasalahan dan tantangan kedepan adalah :

2.4.1. Permasalahan

- 1) Produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan dan hortikultura masih rendah;
- 2) Sebagian besar umur tanaman perkebunan dan hortikultura sudah tua;

- 3) Ketersediaan benih yang berkualitas masih sangat terbatas;
- 4) Daya dukung lahan menurun;
- 5) Kondisi infrastruktur dan prasarana penunjang belum memadai;
- 6) Sumber daya manusia masih terbatas;
- 7) Masih lemahnya akses teknologi pasar dan sumber sumber pembiayaan;
- 8) Kelembagaan petani belum berfungsi secara optimal;
- 9) Dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan masih kurang.

2.4.2. Kekuatan

- 1) Animo petani untuk mengembangkan komoditi perkebunan dan Hortikultura cukup tinggi;
- 2) Tersedianya lahan dan areal perkebunan dan hortikultura rakyat yang cukup luas;
- 3) Tersedianya sumberdaya dan institusi penunjang;
- 4) Tingginya keragaman komoditi perkebunan dan hortikultura yang dapat dikembangkan.
- 5) Permintaan pasar akan produk perkebunan dan hortikultura terus meningkat.

2.4.3. Tantangan/Ancaman

- 1) Produksi, produktivitas dan mutu komoditi perkebunan dan hortikultura rendah;
- 2) Serangan hama dan penyakit tanaman yang cukup tinggi;
- 3) Perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi;
- 4) Import produk perkebunan dan hortikultura;
- 5) Persaingan pasar global yang mensyaratkan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan komitmen petani masih rendah.

2.4.3. Peluang

- 1) Teknologi perkebunan dan hortikultura terus meningkat;
- 2) Kebutuhan produk perkebunan dan hortikultura semakin meningkat;

- 3) Dukungan kegiatan dan pembiayaan dari lembaga penunjang;
- 4) Kesesuaian agroklimat pertanaman perkebunan dan hortikultura.
- 5) Iklim investasi yang kondusif untuk mendorong terwujudnya kemitraan usaha yang sehat, jujur dan berkeadilan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan pembangunan sub sektor Perkebunan dan Hortikultura pada umumnya timbul dari kelemahan yang belum teratasi, kekuatan yang ada belum diberdayakan secara optimal, peluang yang tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan ancaman yang tidak diantisipasi. Dari uraian kinerja lima tahun Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dan UPTD yang merupakan pelaksana Teknis Dinas Perkebunan dan Hortikultura dilapangan terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan dan hortikultura masih rendah;
- 2) Sebagian besar umur tanaman perkebunan dan hortikultura sudah tua;
- 3) Ketersediaan benih yang berkualitas masih sangat terbatas;
- 4) Daya dukung lahan menurun;
- 5) Kondisi infrastruktur dan prasarana penunjang belum memadai;
- 6) Sumber daya manusia masih terbatas;
- 7) Masih lemahnya akses teknologi pasar dan sumber sumber pembiayaan;
- 8) Kelembagaan petani belum berfungsi secara optimal;
- 9) Dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan masih kurang.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan kondisi saat ini, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi sampai dengan tahun 2023, serta mempertimbangkan potensi dan harapan masyarakat Sulawesi Tenggara, maka Visi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA YANG AMAN, MAJU,
SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”**

Berdasarkan Visi pembangunan provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 tersebut maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik serta iman dan taqwa.
2. Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.
3. Mendorong birokrasi pemerintah provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik (good Village Governance) serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan.
4. Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan aspek-aspek sosial ekonomi.

Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan lima tahun kedepan serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi tersebut.

Hasil telaahan visi dan misi tersebut akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategi pelayanan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara yang didasarkan pada tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan dan kebutuhan pengelolaan agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi dimaksud.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 1 (satu) misi Kepala Daerah terpilih yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu :

Misi 2: Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi. Dengan sasaran meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah. Dengan sasaran meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah.

3.3. Telaahan, Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Pembangunan perkebunan dan hortikultura di Sulawesi Tenggara selama 5 tahun kedepan dalam pelaksanaannya mendapat alokasi anggaran dari Kementerian/Lembaga (KL), yaitu dari Ditjen Perkebunan, Ditjen Hortikultura dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang dituangkan dalam beberapa program dan kegiatan sbb :

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar.
 - Penguatan Perlindungan Perkebunan.
 - Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah.
 - Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan.
2. Program Dukungan Manajemen
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan.
3. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
4. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat.
 - Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.
 - Perlindungan Hortikultura.
 - Perbenihan Hortikultura.
5. Program Dukungan Manajemen
 - Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
6. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian.
 - Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan alat Mesin Pertanian.

7. Program Dukungan Manajemen

- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan usaha perkebunan dan hortikultura di Sulawesi Tenggara dikelompokkan dalam dua bentuk perusahaan yakni; 1) Perkebunan Rakyat; dan 2) Perkebunan Besar.

Kedua bentuk usaha perkebunan tersebut masing-masing memberikan kontribusi sesuai dengan ruang lingkup dan spesifikasinya dalam pengembangan perkebunan di Sulawesi Tenggara. Adapun pengembangan dari kedua bentuk usaha perkebunan tersebut yaitu sebagai berikut :

3.4.1. Perkebunan Rakyat

Perkebunan rakyat adalah bentuk usaha perkebunan yang kepemilikan, perusahaan, dan pengelolaannya dilaksanakan oleh rakyat atau petani secara perorangan maupun kelompok. Ciri utama perkebunan rakyat adalah pada umumnya arealnya sangat menyebar, luas kepemilikan lahan/kebun relatif sempit, tingkat penerapan teknologi masih rendah, serta manajemen yang belum tertata baik.

3.4.2. Perkebunan Besar

Disamping perkebunan rakyat, salah satu usaha pengembangan perkebunan di Sulawesi Tenggara dilakukan melalui pola Perkebunan Besar baik Swasta maupun Negara (PTPN).

Pola ini merupakan wadah bagi para Badan Usaha Negara atau pihak swasta lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di bidang perkebunan.

3.4.3. Luas Areal dan Produksi Perkebunan

Perkembangan luas areal perkebunan di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa perkebunan rakyat masih dominan, jenis komoditi perkebunan yang menjadi binaan yaitu meliputi 18 komoditi dengan 7 komoditi unggulan seperti kakao, jambu mete, kelapa, cengkeh, lada dan 13 komoditi lainnya yakni : kopi, kapuk, enau, kemiri, pala, pinang, asam jawa, vanili, jarak pagar, kelapa sawit, sagu.

Perkembangan luas areal tanaman perkebunan rakyat di Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan.

Pada akhir tahun 2017 luas areal perkebunan rakyat mencapai 510.631 Ha dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 475.036 Ha dikarenakan alihfungsi lahan perkebunan menjadi lahan pemungkiman dan lahan pertanian tanaman pangan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1. Gambaran Pelayanan SKPD

Pembangunan sub sektor perkebunan dan hortikultura di Sulawesi Tenggara memegang peranan strategis dalam sistem dan usaha agribisnis berkelanjutan baik pada aspek ekonomi, sosial maupun pelestarian lingkungan. Dari aspek ekonomi, komoditi perkebunan dan hortikultura merupakan sumber pendapatan petani dan devisa negara maupun daerah, sedangkan aspek sosial beberapa komoditi perkebunan dan hortikultura dikembangkan secara turun temurun sehingga menyerap tenaga kerja dan kesempatan berusaha di pedesaan. Peranan strategis tersebut khususnya terkait dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyediaan bahan baku industri, peningkatan ekspor dan devisa negara serta PAD, penyediaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta peningkatan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Kesejahteraan rakyat pada intinya adalah pembangunan manusia. Dalam kaitan itu kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) harus ditingkatkan melalui peningkatan akses, pemerataan serta mutu pelayanan dengan perhatian lebih besar diberikan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan penduduk miskin, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, kepulauan, dan wilayah perbatasan.

Pembangunan Perkebunan dan Hortikultura sebagai sub sektor pertanian yang terdiri dari tanaman tahunan, tanaman semusim serta tanaman rempah dan penyegar perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan dan diharapkan mampu berdaya saing sebab merupakan usaha sebagian besar masyarakat Indonesia dan potensi untuk pengembangannya sangat besar karena didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang berlimpah. Pengembangan tersebut dapat diusahakan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi tanam, dengan usaha pengembangan bukan saja peningkatan produksi yang diharapkan tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Selain itu Pembangunan perkebunan dan hortikultura sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi karena akan meningkatkan penghasilan devisa, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan ketersediaan bahan baku industri.

Pada prinsipnya penyelenggaraan pembangunan di bidang perkebunan dan hortikultura dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini karena sub sektor perkebunan dan hortikultura sebagai bagian dari sektor pertanian merupakan salah satu sub sektor yang penting dalam perekonomian Sulawesi Tenggara.

Hal ini secara nyata telah direalisasikan dan manfaatnya telah dirasakan secara langsung oleh petani perkebunan dan hortikultura di Sulawesi Tenggara. Dimana dalam rentang waktu kurang lebih 5 tahun terakhir ini pembangunan perkebunan dan hortikultura tersebut telah

memberikan pelayanan kepada petani sebagai pelaku sekaligus manajer dan kepada pelaku usaha serta stakeholder yang ada.

Berdasarkan hal di atas maka pembangunan perkebunan dan hortikultura pada lima tahun kedepan pada periode 2018-2023, dalam pelaksanaannya akan tetap mengacu pada kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga akan berkelanjutan dan akan mampu berdaya saing. Sesuai dengan kebijakan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu : 1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang baik, kinerja dan hasilnya antara lain : bantuan benih/bibit dan pupuk; 2) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat, antara lain : LEM Sejahtera; 3) Mendorong minat investasi dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif; 4) Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu.

3.5.2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L, adalah sbb :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri.
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional.
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional.
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian.
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai dengan kebutuhan.
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan.
7. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional.
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

3.5.3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra SKPD

Sasaran Jangka menengah SKPD yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (2018-2023) adalah:

1. Meningkatkan produk, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan dan hortikultura yaitu :
 - Kakao dari 130.182 ton menjadi 130.180 ton;
 - Jambu Mete 23.818 ton menjadi 23.826 ton;
 - Kelapa dari 39.665 ton menjadi 39.678 ton;
 - Lada dari 8.910 ton menjadi 5.069 ton;
 - Cengkeh dari 12.909 ton menjadi 12.911 ton;
 - Kopi dari 2.673 ton menjadi 2.677 ton
 - Pala dari 416 ton menjadi 422 ton
 - Bawang Merah 475 ton menjadi 621 ton
 - Cabe Rawit 8.904 ton menjadi 3.811 ton
 - Cabe Besar 5.180 ton menjadi 1.706 ton
 - Jeruk 21.000 ton menjadi 22.100 ton
 - Durian 11.102 ton menjadi 11.092 ton
2. Meningkatnya nilai tambah, daya saing, produk perkebunan dan hortikultura di pasar domestik maupun internasional;
3. Meningkat dan mantapnya kemandirian kelembagaan petani serta bertambahnya Lembaga Petani (LEM Sejahtera);
4. Meningkatnya kemampuan petani dan petugas Perkebunan dan Hortikultura;
5. Meningkatnya sarana/prasarana perkantoran dan terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif.

3.5.4. Implikasi RT/RW bagi Pelayanan SKPD

Luas areal perkebunan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa perkebunan rakyat masih dominan jenis komoditi perkebunan yang menjadi binaan yaitu meliputi 18 komoditi dengan 5 komoditi unggulan seperti kakao, jambu mete, kelapa, cengkeh, lada dan 11 komoditi lainnya yakni : kopi, kapuk, enau, kemiri, pala, pinang, asam jawa, vanili, jarak pagar, kelapa sawit, sagu dan karet.

Luas areal tanaman perkebunan rakyat di Sulawesi Tenggara tahun 2017 seluas 510.631 Ha dengan melibatkan jumlah tenaga kerja sebanyak 462.360 orang.

Areal komoditi unggulan perkebunan yaitu : kakao, Jambu Mete, kelapa, Cengkeh, dan Lada tahun tahun 2017 seluas 475.570 Ha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 390.642 orang, Secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Komoditi kakao seluas 254.843 Ha, dengan jumlah petani/tenaga kerja sebanyak 165.214 orang;
2. Komoditi Jambu Mete seluas 116.244 Ha, dengan jumlah petani/tenaga kerja sebanyak 94.223 orang;
3. Komoditi Kelapa seluas 57.783 Ha, dengan jumlah petani/tenaga kerja sebanyak 83.837 orang;
4. Komoditi Cengkeh seluas 30.883 Ha, dengan jumlah petani/tenaga kerja sebanyak 24.820 orang;
5. Komoditi Lada seluas 14.817 Ha, dengan jumlah petani/tenaga kerja sebanyak 22.548 orang;

Areal komoditi unggulan perkebunan yaitu : kakao, Jambu Mete, kelapa, Cengkeh, Lada, pala dan kopi. Tahun 2021 luas area tanaman perkebunan rakyat seluas 475.036 Ha dengan melibatkan jumlah tenaga kerja sebanyak 402.389 orang. Secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Komoditi kakao seluas 236.793 Ha, dengan jumlah petani/tenaga kerja sebanyak 152.891 orang;

2. Komoditi Jambu Mete seluas 115.441 Ha, dengan jumlah petani/tenaga kerja sebanyak 92.529 orang;
3. Komoditi Kelapa seluas 58.765 Ha, dengan jumlah petani/tenaga kerja sebanyak 84.300 orang;
4. Komoditi Cengkeh seluas 33.984 Ha, dengan jumlah petani/tenaga kerja sebanyak 26.230 orang;
5. Komoditi Lada seluas 16.152 Ha, dengan jumlah petani/tenaga kerja sebanyak 24.022 orang;
6. Komoditi pala seluas 5.025 Ha, dengan jumlah petani/tenaga kerja sebanyak 5.774 orang;
7. Komoditi kopi seluas 8.876 Ha, dengan jumlah petani/tenaga kerja sebanyak 16.643 orang;

Areal komoditi unggulan hortikultura yaitu : bawang merah, cabe rawit, cabe besar dan jeruk.

3.5.5. Implikasi KHLS bagi Pelayanan SKPD

Sebagai akibat laju degradasi lahan dan penurunan kualitas lingkungan hidup, yang tidak dapat diimbangi oleh tingkat kemampuan upaya rehabilitasinya dan kegiatan terkait lainnya, ditambah terus berlangsungnya pemanfaatan lahan melampaui daya dukungnya karena tekanan tuntutan kebutuhan yang terus berkembang maka masalah. Rehabilitasi lahan dan kualitas lingkungan hidup telah berada pada tingkat yang cukup kritis, sehingga perlu mendapat perhatian dari semua pihak terkait.

- a. Meningkatkan pengembangan penerapan sistem pertanian konservasi pada wilayah-wilayah pengembangan usaha perkebunan dan hortikultura tanaman tahunan sebagai usaha pokok disertai pengembangan cabang usaha tani yang sesuai penerapannya menganut kaidah-kaidah konservasi lahan.
- b. Melanjutkan dan meningkatkan upaya penerapan paket teknologi ramah lingkungan, teknologi tradisional dan teknologi alternative pada kegiatan pengembangan perkebunan dan hortikultura seperti antara lain kegiatan-kegiatan pembukaan lahan, rehabilitasi,

pengembangan dan pemeliharaan, intensifikasi usaha tanaman perkebunan serta penerapan pengendalian hama terpadu.

- c. Meningkatkan dukungan upaya rehabilitasi lahan kritis dan mengurangi gangguan terhadap kawasan lindung melalui pengembangan usaha perkebunan dan hortikultura pada wilayah-wilayah lahan kritis dan pada kawasan penyangga hutan lindung hutan swaka dan tanaman nasional.
- d. Membantu upaya peningkatan pengertian dan kesadaran untuk penerapan pengembangan teknologi pengolahan limbah industri perkebunan dan hortikultura pengintegrasian biaya lingkungan terhadap biaya produksi dan pengembangan teknologi produksi bersih.
- e. Mendukung upaya untuk terlaksananya pemantauan yang kontinu, pengawasan evaluasi standar mutu lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan.





BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.1.1. Tujuan Jangka Menengah OPD

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi untuk mewujudkan Visi pembangunan perkebunan dan hortikultura selama periode tahun 2018-2023, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan.

Tujuan pembangunan perkebunan dan hortikultura selama periode tahun 2018 - 2023 adalah **meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan hortikultura sebagai wujud kontribusi peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah Sulawesi Tenggara.**

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sasaran pembangunan perkebunan dan hortikultura yang akan dicapai selama periode tahun 2018 - 2023 adalah : “meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan hortikultura”

Tujuan dan sasaran jangka menengah dan indikator kinerja SKPD Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023, secara jelas dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra, Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke - (Ton)						
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun -4	Tahun-5	Tahun -6	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	
Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan hortikultura	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan hortikultura	Kontribusi PDRB Pertanian							
		Jumlah Produksi Perkebunan (Ton)					212.714	213.738	214.763
		Kakao	130.182	135.182	140.182	128.180	129.180	130.180	
		Jambu Mete	23.818	23.820	23.821	23.823	23.824	23.826	
		Kelapa Dalam	39.665	39.670	39.675	39.670	39.674	39.678	
		Cengkeh	12.909	12.956	13.002	12.891	12.901	12.911	
		Lada	8.910	8.913	8.917	5.061	5.065	5.069	
		Kopi	-	-	-	2.673	2.675	2.677	
		Pala	-	-	-	416	419	422	
		Jumlah Produksi Hortikultura (ton)					38.630	38.980	39.330
		Bawang Merah	475	880	900	521	571	621	
		Cabai Rawit	8.904	9.064	9.224	3.611	3.711	3.811	
		Cabai Besar	5.180	5.430	5.630	1.506	1.606	1.706	
		Jeruk	21.000	21.500	21.700	21.890	21.950	22.100	
		Durian	-	-	-	11.102	11.142	11.092	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 dengan efektif dan efisien. Berdasar tujuan dan sasaran ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan perkebunan dan hortikultura tahun 2018-2023 sebagai berikut:

5.1.1. Strategi

Strategi untuk pembangunan perkebunan dan hortikultura tahun 2018 -2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi melalui intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan perluasan usahatani tanaman perkebunan dan hortikultura;
2. Optimalisasi dan mengembangkan kebun benih dinas sebagai penghasil benih bermutu bersertifikat sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli daerah dan optimalisasi fungsi sertifikasi benih sebagai penjamin penggunaan benih bermutu di masyarakat;
3. Pencegahan, pengendalian dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan kekeringan;
4. Meningkatkan penggunaan pupuk organik, pestisida nabati dan agensia hayati yang ramah lingkungan;
5. Melaksanakan sertifikasi mutu hasil pertanian tanaman perkebunan dan hortikultura terutama untuk produk pertanian organik;
6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam bidang pengolahan hasil perkebunan dan hortikultura;

7. Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan dan hortikultura dengan mekanisasi.
8. Melaksanakan penambahan/rehabilitasi infrastruktur pertanian tanaman perkebunan dan hortikultura;
9. Peningkatan kapasitas dan kompetensi teknis aparatur dinas dalam mendukung kegiatan pembangunan perkebunan dan hortikultura;
10. Pendampingan, pengawalan, pelatihan, fasilitasi pelaksanaan peran kelembagaan petani;
11. Penataan dan peningkatan sistem administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin serta kapasitas aparatur dinas dalam mendukung kegiatan pembangunan perkebunan dan hortikultura.

5.1.2. Kebijakan

Pokok – pokok kebijakan pembangunan pertanian perkebunan dan hortikultura dan perkebunan berdasarkan skala prioritas penyelesaian akselerasi rencana strategis (Renstra) tahun 2018-2023 pembangunan Sulawesi Tenggara bidang pertanian tanaman perkebunan dan hortikultura sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi melalui intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan perluasan areal perkebunan dan hortikultura;
2. Penyediaan benih unggul, bermutu dan bersertifikasi;
3. Peningkatkan pengendalian OPT dan mitigasi bencana alam banjir dan kekeringan;
4. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk mengembangkan pupuk organik, pestisida nabati dan agens pengendali hayati yang ramah lingkungan;
5. Peningkatan mutu produk perkebunan dan hortikultura;
6. Penyiapan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan perkebunan dan hortikultura;

7. Penambahan jumlah alsintan di tingkat kelompok tani;
8. Menyiapkan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan produksi tanaman perkebunan dan hortikultura;
9. Fasilitasi pelaksanaan kelembagaan;
10. Peningkatan dukungan aparatur dinas melalui perbaikan manajemen.

VISI : TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA YANG AMAN, MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

MISI 2 : Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi local dan peningkatan investasi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan hortikultura	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan hortikultura	1. Meningkatkan produksi melalui intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan perluasan usahatani tanaman perkebunan dan hortikultura;	1. Peningkatan produksi melalui intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan perluasan areal perkebunan dan hortikultura;
		2. Pengembangan sistem pertanian organik	1. Gerakan pengendalian OPT dan mitigasi bencana alam banjir dan kekeringan;
		3. Mengembangkan sistem perbenihan perkebunan dan hortikultura	1. Peningkatan produksi benih unggul perkebunan dan hortikultura; 2. Pengawasan produksi dan peredaran benih perkebunan dan hortikultura;
		4. Meningkatkan penggunaan pupuk organik, pestisida nabati dan agensia hayati yang ramah lingkungan	1. peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Untuk mengembangkan pupuk organik, pestisida nabati dan agensia pengendali hayati yang ramah lingkungan
		5. Melaksanakan sertifikasi mutu hasil perkebunan dan hortikultura terutama untuk produk pertanian organik	1. Peningkatan mutu produk pertanian tanaman perkebunan dan hortikultura;
		6. Meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana perkebunan dan Hortikultura	1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan hortikultura dengan menggunakan alat mesin untuk mendukung; 2. Melaksanakan penambahan/rehabilitasi infrastruktur pertanian tanaman perkebunan dan hortikultura
		7. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam bidang pengolahan hasil perkebunan dan hortikultura	1. penyiapan sumber daya berkualitas untuk mendukung pembangunan perkebunan dan hortikultura
	2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Perkebunan dan Hortikultura.	1. Pendampingan, Pengawasan, Pelatihan, Fasilitasi pelaksanaan peran kelembagaan LEM	1. Fasilitasi pelaksanaan kelembagaan LEM
		2. Penyusunan perencanaan penyuluhan dan penerapan metode Penyuluhan	1. Penyusunan Program Penyuluhan
		3. Melaksanakan pengembangan administrasi perkantoran, peningkatan	1. Peningkatan dukungan aparatur dinas melalui perbaikan manajemen



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 2.1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana
 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - 2.2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih
 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 3.1. Penataan Prasarana Pertanian
 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
 - Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - 4.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan

- Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

5.1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
- Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

6. Program Penyuluhan Pertanian

6.1. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

- Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta

6.2. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

- Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
- Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

6.3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

- Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
- Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani
- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani

Tabel. 6.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 2018-2020 (Permendagri No. 13 ahun 2016)
DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tujan	Sasaran	Urusan/Bidang urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Hasil Program/ Keluaran Kegiatan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Target	Rp		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
		URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA												
Meningkatkan Produksi, Produktivitas Tanaman Perkebunan dan Hortikultura														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan adminiatrasi perkantoran		100 %	1.546.067	100 %	1.930.408	100%	2.180.798	100%	5.657.273	Sekretariat		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan yang terkirim		12 Bulan	13.428	12 Bulan	13.428	12 Bulan	15.000	5000	41.856			
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik		12 Bulan	283.000	12 Bulan	324.000	12 Bulan	356.400	12 Bulan	963.400			
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor		12 Bulan	27.000	12 Bulan	277.000	12 Bulan	305.000	12 Bulan	609.000			
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perlengkapan dan peralatan kantor selalu siap operasional/ pakai		12 Bulan	46.000	12 Bulan	46.000	12 Bulan	50.600	12 Bulan	142.600			
5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedia Alat Tulis kantor dalam jumlah yang cukup		12 Bulan	75.000	12 Bulan	75.000	12 Bulan	85.000	12 Bulan	235.000			
6	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Berbagai dokumen dapat dicetak dan digandakan		12 Bulan	60.000	12 Bulan	60.000	12 Bulan	66.000	12 Bulan	186.000			

7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		12 Bulan	21.000	12 Bulan	21.000	12 Bulan	23.100	12 Bulan	65.100		
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Koran, majalah dan peraturan perundang-undangan		12 Bulan	11.880	12 Bulan	11.880	12 Bulan	13.068	12 Bulan	36.828		
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Snak bagi PNS, khususnya pada saat pertemuan/ rapat-rapat		12 Bulan	80.000	12 Bulan	60.000	12 Bulan	66.000	12 Bulan	206.000		
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		12 Bulan	525.259	12 Bulan	635.000	12 Bulan	698.500	12 Bulan	1.858.759		
11	Jasa Administrasi Perkantoran	Terbayarnya Jasa administrasi perkantoran		12 Bulan	168.800	12 Bulan	168.800	12 Bulan	195.000	12 Bulan	532.600		
12	Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan	Tersedianya jasa Publikasi informasi tentang Disbunhorti melalui media cetak/elektronik		12 Bulan	80.000	12 Bulan	50.000	12 Bulan	100.000	12 Bulan	230.000		
-		Tersedia informasi penyuluhan bagi petani, masyarakat dan pelaku usaha di bidang perkebunan dan hortikultura							-		-		
13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD	Tersusunya laporan pertanggungjawaban SKPD		12 Bulan	103.800	12 Bulan	137.400	12 Bulan	151.140	12 Bulan	392.340		
14	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	Terpenuhinya Laporan Aset SKPD		12 Bulan	50.900	12 Bulan	50.900	12 Bulan	55.990	12 Bulan	157.790		
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Persentase pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana aparatur		100 %	2.960.118	100 %	7.616.270	100%	6.375.572	100%	16.951.960		
15	Pembangunan Rumah Dinas	Tersedia Rumah Dinas											
16	Pembangunan gedung kantor	Terbangun gedung kantor Dinas		5 Paket	110.762	9 Paket	4.435.000	1 Unit	2.000.000	17 Pkt	6.545.762		

17	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedia kendaraan Dinas Operasional R-4			-	1 Unit	450.000	1 Unit	450.000	8 Unit	900.000		
		Tersedia kendaraan Dinas Operasional R-2						5 Unit	150.000	25 Unit	150.000		
18	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor		11 Paket	2.621.356	19 Paket	754.500	10 Paket	500.000	80 paket	3.875.856		
19	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Meubelair gedung kantor				5 Paket	590.000	1 Paket	2.000.000	8 Paket	2.590.000		
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor									-		
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor		1 Tahun	228.000	1 Tahun	243.650	1 Tahun	268.015		739.665		
22	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor									-		
23	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor				1 Paket	123.120	1 Paket	207.557	5 paket	330.677		
24	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terehabnya Rumah Dinas									-		
25	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terehabnya gedung kantor				13 Paket	1.020.000	2 Paket	800.000	17 paket	1.820.000		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pengadaan sarana peningkatan disiplin aparatur	-		-	100 %	64.800	100%	160.000	100%	224.800	Sekretariat	
26	Pengadaan mesin/kartu absensi	Tersedianya Mesin Absensi						5 Unit	25.000	10	25.000		
27	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedia Pakaian dinas (hansip dan keki)						225 Pasang	135.000	450	135.000		
28	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedia Pakaian khas daerah dan baju olah raga				216 pasang	64.800			666	64.800		

4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan						10 Orang	165.000	40 Orang	165.000	Sekretariat	
29	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian						1 Kegiatan	15.000	4 Kegiatan	15.000		
30	Pendidikan/Latihan Non Formal	Terikutinya Pelatihan Non Formal Bagi PNS						10 Orang	150.000	40 Orang	150.000		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terlaksananya pelaporan kinerja dan keuangan		100 %	7.000	100 %	7.000	100%	10.000	100%	24.000		
31	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunya Lapid SKPD, LPPD		1 Dokumen	3.500	1 Dokumen	3.500	1 Dokumen	5.000	6 Dokumen	12.000		
32	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunya laporan keuangan akhir tahun		1 Dokumen	3.500	1 Dokumen	3.500	1 Dokumen	5.000	6 Dokumen	12.000		
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD	Persentase terlaksananya sistem perencanaan SKPD		100 %	8.500	100 %	18.500	100%	5.000	100%	32.000	Sekretariat	
33	Penyusunan RENSTRA SKPD	Tersusunya Rencana Strategis		1 Dokumen	5.000	1 Dokumen	15.000			2 Dok	20.000		
34	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunya Rencana Kerja SKPD (Renja, RKA, Renja Perubahan dan RKA Perubahan)		1 Dokumen	3.500	1 Dokumen	3.500	1 Dokumen	5.000	6 Dok	12.000		
1. Meningkatkan produksi, produktivitas tanaman perkebunan dan hortikultura													
7	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1. Meningkatnya produksi perkebunan	206.571 Ton	215.487 Ton	2.789.600	220.547 Ton	9.268.642	225,607 Ton	10.468.390	-	22.526.632	Bidang Perkebunan, Hortikultura,	
		2. Meningkatnya produksi hortikultura	37.583 Ton	35.559 Ton		36.874 Ton		37.454 Ton		399.199 Ton		UPTD BBIH, BPTPH, BPSBPH	
35	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian/perkebunan									-		
36	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Tersedianya Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (bibit,						12 Paket	2.054.500	48 Paket	2.054.500	Horti, BBIH, PSDM	

		pupuk, mulsa, pestisida)											
37	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Tersedianya Bibit Unggul Perkebunan dan Hortikultura		15 Paket	1.651.500	16 Paket	5.280.642	10 Paket	3.420.000	49 Paket	10.352.142	BBIH, BUN, HORTI, BPSBPH	
38	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	Terlaksananya pertemuan sosialisasi peraturan sertifikasi perbenihan perkebunan dan hortikultura						10 Paket	1.120.000	40 Paket	1.120.000	BPSBPH	
		Terlaksananya sertifikasi dan pengendalian benih tanaman perkebunan dan hortikultura									-		
39	Pelatihan Petugas Sertifikasi dan Pengawasan Benih Perkebunan dan Hortikultura	Terlaksana pelatihan petugas sertifikasi dan pengawasan benih perkebunan dan hortikultura						5 Keg	110.000	25 Keg	110.000	BPSBPH	
40	Pelatihan Petani pertanian/perkebunan	Terlatihnya petani dan petugas mendukung rehabilitasi, peremajaan dan Intensifikasi tanaman perkebunan dan Hortikultura				5 Keg	1.000.000	5 Keg	1.000.000	20 Keg	2.000.000	BUN	
41	Sosialisasi Undang-undang Perbenihan	Undang-undang perbenihan dapat dipahami oleh petugas kab./Kota						1 Keg	100.000	4 Keg	100.000	BUN HORTI	
42	Pertemuan Koordinasi Pengembangan Kawasan Kakao Tingkat Provinsi	Terlaksana pengembangan kawasan kakao di prov. Sultra						1 Keg	100.000	4 Keg	100.000	BUN	
43	Pertemuan Pengawasan Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan	Terlaksanan penanggulangan gangguan usaha perkebunan						1 Keg	100.000	4 Keg	100.000	BUN	
44	Pertemuan Pengawasan Benih Perkebunan Ilegal	Terlaksanan pengawasan peredaran benih ilegal						1 Keg	75.000	4 Keg	75.000	BPSBP	
45	Pengendalian OPT Pertanian/perkebunan	Terkendalinya OPT Hortikultura secara ramah lingkungan (Pestisida Nabati dan Pupuk Organik)		5 Kegiatan	1.138.100	3 Kelas	2.650.000	3 Paket	150.000	15 Paket	3.938.100	BPTPH	
46	Pengadaan alat pasca panen pertanian/perkebunan	Tersedianya Alat Pasca panen dan pengolahan komoditi perkebunan/hortikultura						3 Paket	1.251.890	12 Paket	1.251.890	BUN HORTI	
47	Penyuluhan Peningkatan produksi pertanian/perkebunan (GAP dan GHP Sayuran)	Tersedianya Kebun percontohan Hortikultura dan perkebunan				3 Keg	338.000	3 Keg	400.000	3 Keg	738.000	HORTI	
48	Penyuluhan Peningkatan produksi pertanian/perkebunan (GAP/SOP Buah)	Tersedianya Kebun percontohan Hortikultura dan perkebunan -SL-GAP									-	HORTI	

		(Buah-2an, Sayuran, tanaman hias, dan Biofarmaka)											
49	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (SL-PHT)	Terlatihnya petani melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu (SL- PHT) Tanaman Perkebunan dan Hortikultura					10 Klp	500.000	40 Klp	500.000	BPTPH		
30	Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit	Tersedianya Harga TBS Kelapa Sawit					4 Keg	2.000	20 Keg	2.000	BUN		
31	Pelatihan dan bimbingan petugas, produsen/penangkar benih perkebunan dan hortikultura	Terlaksana pelatihan/bimbingan petugas, produsen/penangkar benih hortikultura					1 Keg	30.000	4 Keg	30.000	BBIH		
32	Perbanyak benih perkebunan/hortikultura secara konvensional dan kultur jaringan	Terlatihnya petani/penangkar benih hortikultura					2 Kelas	44.000	11 Kelas	44.000	BUN HORTI UPTD		
33	Pertemuan koordinasi ketersediaan benih Perkebunan dan hortikultura	Terlaksananya penyediaan benih hortikultura bermutu					1 Keg	11.000	5 Keg	11.000	BUN HORTI		
8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan	Jumlah promosi hasil produksi perkebunan dan hortikultura yang dilakukan	2	2 Kegiatan	214.000	2 Kegiatan	2 Keg	1.000.000	10 Keg	1.394.000			
34	pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Tersedia buletin informasi pasar Hortikultura dan perkebunan					2 Paket	100.000	4 Paket	100.000	BUN HORTI		
35	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan	Tersedia kemasan produk yang akan dipasarkan					17 Keg	700.000	73 Keg	700.000	BUN HORTI		
36	Promosi hasil-hasil perkebunan dan Hortikultura	Terlaksananya promosi hasil perkebunan dan hortikultura		2 Kegiatan	214.000	2 Keg	2 Keg	200.000	10 Keg	594.000	BUN HORTI		
9	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan Tepat Guna	Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan penerapan teknologi perkebunan	0	0	41.745	30 Orang	60 Org	2.061.200	270 Org	3.082.945			
37	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Tersedia Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna		1 Unit	41.745	4 Unit	7 Paket	1.721.200	30 Paket	2.592.945	PSP		
38	Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Penerapan teknologi perkebunan tepat guna				2 Kelas	2 Kelas	240.000	10 Kelas	390.000	PSDM		
39	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Pelatihan	Terlaksana Pelatihan Pelatihan Petani Pengolahan Lahan Tanpa Bakar					1 Paket	100.000	4 Paket	100.000	PSP		

	Petani Pengolahan Lahan Tanpa Bakar)												
	2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Perkebunan dan Hortikultura.												
10	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase kelembagaan petani yang aktif	25%	30 %	1.073.280	40 %	1.859.480	50%	5.361.500	80%	8.294.260		
40	Pelatihan petani dan pelaku agrobisnis	Meningkatnya kemampuan/keterampilan petani dan pelaku agrobisnis usaha hortikultura						16 Paket	3.021.500	80	3.021.500	PSDM	
41	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Terlatihnya pengurus Lembaga Petani LEM Sejahtera		4 Kegiatan	1.000.000	3 Keg	1.786.200	4 Kegiatan	1.000.000	22 Keg	3.786.200	PSDM	
42	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan	Pendampingan petani LEM Sejahtera						4 Kegiatan	1.260.000	17 Keg	1.260.000	PSDM	
43	Monitoring dan Evaluasinya kegiatan	terkendalinya kegiatan melalui Monitoring dan Evaluasinya kegiatan		17 Kab/kota	73.280	17 Kab/kota	73.280	17 Kab/kota	80.000	17 Kab/kota	226.560	Subag Perencanaan	
11	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Persentase tenaga penyuluh yang terlatih	0			100 %	404.900	100%	450.000	100%	854.900		
44	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Pertanian/Perkebunan	Terlatihnya PLP-TKP3H				134 Orang	404.900	134 Orang	450.000	134 Org	854.900	PSDM	
		Jumlah (000)			8.640.309		22.330.000		28.237.460		59.207.770		
		Jumlah			8.640.309.225		22.330.000.000		28.237.460.440,00		59.207.769.665		

Kendari, Juni 2022
Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Tenggara



LA HARUNA, S.P., M.SI.
NIP. 19721231 200212 1 026

Tabel. 6.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 2021-2023 (Permendagri No. 050-5889 Tahun 2021)
DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan		Indikator	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun-4 (2021)			Tahun-5 (2022)		Tahun-6 (2023)		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. ()		Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
OPD : DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA								38.858.383.056			100%	29.904.295	100%	32.872.725	38.921.160.076	Sekretariat		
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			20.874.634.561	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100%	25.097.516	100%	27.607.268	20.927.339.345				
3	2	0	1.	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7 Dokumen 112.417.122	Tersedia Dokumen/Laporan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja	7 Dokumen	221.000	8 Dokumen	243.100	112.881.222				
3	2	0	1.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Perencanaan OPD (Renstra, Renja, RKA, Renja Perubahan dan RKA Perubahan)		4 Dokumen 13.143.094	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	16.500	5 Dokumen	18.150	13.177.744				

3	2 7	0 1	1. 01	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Kinerja OPD (Lakip SKPD, LPPD)		2 Doku men	4.999.471	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lapora n	5.500	2 Lapora n	6.050	5.011.021		
3	2 7	1	1, 01	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terkendalnya kegiatan melalui Monitoring dan Evaluasinya kegiatan		17 Kab/ kota	94.274.5 57	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lapora n	199.00 0	1 Lapora n	218.90 0	94.692.457		
3	2 7	1	1, 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.892.1 24.388	Terlaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	20.868 .533	100%	22.955 .386	16.935.9 48.307		
3	2 7	1	1, 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN		221 ASN	16.701.93 4.800	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/ Bulan	20.58 0.154	210 Orang/ Bulan	22.63 8.169	16.745.153.1 23		
3	2 7	0 1	1. 02	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun		1 Doku men	3.958.320	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Lapora n	5.500	1 Lapora n	6.050	3.969.870		
3	2 7	0 1	1. 02	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan pertanggungja waban SKPD		12 Bula n	186.231.2 68	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Lapora n	282.8 79	18 Lapora n	311.1 67	186.825.314		

3	27	1	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			135.000.000	Terlaksana Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	300.000	100%	330.000		135.630.000		
3	27	01	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedia Pakaian khas daerah, baju olah raga, baju keki dan baju kopri		225 Pasa ng	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	225 Paket	150.000	225 Paket	165.000		135.315.000		
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1 Kegiatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000	10 Orang	55.000		105.000		
3	27	1	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian		1 Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	100.000	50 Orang	110.000		210.000		
3	27	1	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			584.543.219	Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	811.833	100%	893.017		586.248.069		
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 Bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerapan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	27.951	12 Paket	30.746		23.916.697		
3	27	1	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedia Alat Tulis kantor dalam jumlah yang cukup		12 Bulan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	102.850	12 Paket	113.135		88.443.114		
3	27	1	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Berbagai dokumen dapat dicetak dan digandakan		12 Bulan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	79.860	12 Paket	87.846		72.665.706		
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Koran, majalah dan peraturan		12 Bulan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12 Dokumen	15.812	12 Dokumen	17.394		11.913.206		

						perundang-undangan			Undangan yang Disediakan										
3	27	1	1,068	0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Snack bagi PNS, khususnya pada saat pertemuan/ rapat-rapat	12 Bulan	37.660.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24 Laporan	85.360	24 Laporan	93.896		37.839.256				
3	27	01	1,069	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	350.420.090	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	500.000	60 Laporan	550.000		351.470.090				
3	27	01	1,007		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.202.102.000	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah	19 Paket	1.050.000	33 Paket	1.155.000		1.204.307.000				
3	27	01	1,072	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas	11 Unit	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	500.000	11 Unit	550.000		1.050.000				
3	27	1	1,075	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	71.000.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	150.000	1 Paket	165.000		71.315.000				
3	27	1	1,076	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	200.000	20 Unit	220.000		420.000				
3	27	01	1,079	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	7 Pkt	1.131.102.000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000	1 Unit	220.000		1.131.522.000				
3	27	01	1,008		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			640.357.462	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224 Laporan	686.150	224 Laporan	754.765		641.798.377				

3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan unggulan (kakao, Jambu Mete, Kelapa, Cengkeh, Lada, Pala, Kopi) dan Jumlah Produksi Hortikultura unggulan (Bawang Merah, Cabe Rawit, Cabe Besar, Jeruk, dan Durian)		1. Bun: 212.714 Ton 2. Horti: 38.630 Ton	17.725.699.995	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan unggulan (kakao, Jambu Mete, Kelapa, Cengkeh, Lada, Pala, Kopi) dan Jumlah Produksi Hortikultura unggulan (Bawang Merah, Cabe Rawit, Cabe Besar, Jeruk, dan Durian)	1. Bun: 213.738 Ton 2. Horti: 38.980 Ton	4.326.779	1. Bun: 214.763 Ton 2. Horti: 39.330 Ton	4.759.457	17.734.786.231		
3	2	0	1,01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Sarana Perkebunan dan Hortikultura		9 Laporan	1.022.923.700	Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Sarana Perkebunan dan Hortikultura	9 Laporan	620.000	14 Laporan	682.000	1.024.225.700		
3	2	0	1,01	0	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksana pengawasan peredaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian		2 Laporan	-	Terlaksana pengawasan peredaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	600.000	2 Laporan	660.000	1.260.000		
3	2	0	1,01	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		7 Dokumen	1.022.923.700	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	7 Dokumen	20.000	12 Dokumen	22.000	1.022.965.700		
3	2	0	1,02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman perkebunan dan		43 Laporan/Sertifikat	16.702.776.295	Jumlah Laporan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	43 Laporan/Sertifikat	3.706.779	35 Laporan/Sertifikat	4.077.457	16.710.560.531		

3	2	0	1,		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana perkebunan dan hortikultura yang diberikan		18 Paket	-	Jumlah Paket Penataan Prasarana Perkebunan dan Hortikultura	29 Paket	160.000	18 Paket	176.000		336.000		
3	2	0	1,	0	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tersusun Rencana Aksi Daerah pengembangan kawasan Perkebunan dan Hortikultura di prov. Sultra		2 Keg	-	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	30.000	1 Dokumen	33.000		63.000		
3	2	0	1,	0	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tersedia dan termanfaatkan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan dan Hortikultura		2 Paket	-	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	30.000	1 Dokumen	33.000		63.000		
3	2	0	1,	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Tersedia dan terlaksana pengelolaan Jalan Usaha Tani		4 Paket	-	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	15 Dokumen	30.000	4 Dokumen	33.000		63.000		
3	2	0	1,	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Tersedia dan terlaksana Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		4 Paket	-	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	4 Dokumen	30.000	4 Dokumen	33.000		63.000		
3	2	0	1,	0	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Terlaksana Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Perbenihan dan Proteksi Perkebunan/ Hortikultura		4 Unit	-	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	4 Unit	20.000	4 Unit	22.000		42.000		

3	2	0	1,	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terlaksana Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Perkebunan dan Hortikultura serta Sarana Pendukungnya	4 Unit	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangung, Dipelihara dan Direhabilitasi	4 Unit	20.000	4 Unit	22.000	42.000		
3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Presentase luas areal pengendalian OPT Perkebunan 2. Presentase luas areal pengendalian OPT Hortikultura	1. Bun : 11,7 3% 2. Horti : 13,7 1%	196.800.000	1. Presentase luas areal pengendalian OPT Perkebunan 2. Presentase luas areal pengendalian OPT Hortikultura	1. Bun: 35,19 % 2. Horti: 55,36 %	75.000	1. Bun: 46,19 % 2. Horti: 65,36 %	82.500	196.957.500		
3	2	0	1,	0	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dan perkebunan	200 Ha	196.800.000	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dan perkebunan	205 Ha	75.000	550 Ha	82.500	196.957.500		
3	2	0	1,	0	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalnya OPT Hortikultura dan Perkebunan secara ramah lingkungan (Pestisida Nabati dan Pupuk Organik)	5 Paket	196.800.000	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	200 Ha	25.000	500 Ha	27.500	196.852.500		
3	2	0	1,	0	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksanaan penanggulangan gangguan usaha perkebunan	1 Keg	-	Jumlah Luas Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5 Ha	25.000	50 Ha	27.500	52.500		

3	2	0	1,	0	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terlaksana Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura, Perkebunan		1 Kegiatan	-	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	25.000	1 Laporan	27.500	52.500		
3	2	0			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan izin usaha perkebunan dan hortikultura		2 IUP	-	Penerbitan izin usaha perkebunan dan hortikultura	2 IUP	60.000	4 IUP	44.000	104.000		
3	2	0	1,		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi izin usaha perkebunan dan hortikultura		3 Dokumen	-	Jumlah fasilitasi izin usaha perkebunan dan hortikultura	3 Dokumen	60.000	3 Dokumen	44.000	104.000		
3	2	0	1,	0	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Tersedia standar pelayanan (SOP) pemberian izin usaha perkebunan dan hortikultura		1 Dokumen	-	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	20.000	1 Dokumen	-	20.000		
3	2	0	1,	0	Penilaian dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksana Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha		1 Dokumen	-	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000	1 Dokumen	22.000	42.000		
3	2	0	1,	0	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terlaksana Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Perkebunan dan Hortikultura		1 Dokumen	-	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	20.000	1 Laporan	22.000	42.000		

3	2	0			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan petani yang aktif		75%	61.248.500	Persentase kelembagaan petani yang aktif	75%	185.000	80%	203.500		61.637.000		
3	2	0	1,01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah PLP-TKP3H yang terlatih		150 Org	-	Jumlah Tenaga Penyuluh Perkebunan dan Hortikultura yang Dikembangkan	150 Org	25.000	150 Org	27.500		52.500		
3	2	0	1,01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Terlatihnya PLP-TKP3H		150 Orang	-	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi	150 Orang	25.000	150 Orang	27.500		52.500		
3	2	0	1,02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kegiatan penyuluhan perkebunan dan hortikultura yang terlaksana		27 Keg.	-	Jumlah Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluh Pertanian	18 Dokumen /Kelompok	40.000	18 Dokumen /Kelompok	44.000		84.000		
3	2	0	1,02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Penerapan teknologi perkebunan tepat guna		12 Kelas	-	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	20.000	2 Dokumen	22.000		42.000		
3	2	0	1,02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Meningkatnya kemampuan/keterampilan petani dan pelaku agribisnis usaha hortikultura		16 Paket	-	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	16 Kelompok	20.000	16 Kelompok	22.000		42.000		
3	2	0	1,03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan petani perkebunan dan hortikultura yang terlatih		10 Klpk	61.248.500	Jumlah kelembagaan Ekonomi Petani yang Berbasis Kawasan	18 Unit/Lap.	120.000	18 Unit/Lap.	132.000		61.500.500		
3	2	0	1,03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Terbentuk dan terlatihnya pengurus lembaga Petani LEM		10 Kegiatan	61.248.500	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	10 Unit	40.000	10 Unit	44.000		61.332.500		

						Sejahtera											
3	2	0	1,	0	Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	Pendampingan petani LEM Sejahtera		6 Kegiatan	-	Jumlah Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	6 Laporan	40.000	6 Laporan	44.000		84.000	
3	2	0	1,	0	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Terlatihnya petani melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu (SL- PHT) Tanaman Perkebunan dan Hortikultura		12 Kelompok	-	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	12 Unit	40.000	12 Unit	44.000		84.000	

Kendari, Juni 2022
Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi



LA HARUNA, S.P., M.SI.

NIP. 19721231 200212 1 026

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara yang menunjukkan secara langsung keluaran (*output*) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023. Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu sebagai berikut:

Tabel 7.1

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD (2017)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2023)
			1	2	3	4	5	6	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kontribusi PDRB Pertanian			25,18	24,50	28,78	25,10	25,75	25,75
2	Jumlah Produksi Perkebunan (Ton)	206.571	215.487	220.547	225.607	212.714	213.738	214.763	214.763
	Kakao	125.182	130.182	135.182	140.182	128.180	129.180	130.180	130.180
	Jambu Mete	23.817	23.818	23.820	23.821	23.823	23.823	23.826	23.826
	Kelapa Dalam	39.660	39.665	39.670	39.675	39.670	39.674	39.678	39.678
	Cengkeh	12.862	12.912	12.962	13.012	12.891	12.901	12.911	12.911
	Lada	5.050	8.910	8.913	8.917	5.061	5.065	5.069	5.069
	Kopi	-	-	-	-	2.673	2.675	2.677	2.677
	Pala	-	-	-	-	416	419	422	422
3	Jumlah Produksi Hortikultura (ton)	37.583	35.559	36.874	37.454	38.630	38.980	39.330	39.330
	Bawang Merah	372	475	880	900	521	571	621	621
	Cabai Rawit	3.312	8.904	9.064	9.224	3.611	3.711	3.811	3.811
	Cabai Besar	1.206	5.180	5.430	5.630	1.506	1.606	1.706	1.706
	Jeruk	32.693	21.000	21.500	21.700	21.890	21.950	22.100	22.100
	Durian	-	-	-	-	11.102	11.142	11.092	11.192

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 merupakan perubahan dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023. Melalui dokumen tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan perkebunan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan adanya Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan pengembangan perkebunan dan hortikultura dapat lebih terarah dan terintegrasi dengan instansi terkait sehingga akan meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan dan hortikultura untuk memperbaiki tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat.

Perubahan Rencana strategis ini disusun dengan memperhatikan faktor yang ada di lingkungan Dinas Perkebunan dan Hortikultura dan konsep ini tidak bersifat statis melainkan dapat diubah dan atau perubahan yang mungkin terjadi. Pencapaian Visi, Misi dan tujuan suatu organisasi hanya akan dapat berjalan jika direncanakan dengan sebaik-baiknya dan memperhatikan setiap variabel yang dianggap mempunyai peran fungsi dalam tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian tidaklah berlebihan jika dikatakan penyusunan perubahan rencana strategis merupakan bagian yang tidak boleh ditinggalkan dalam proses pencapaian visi, misi dan tujuan suatu organisasi. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara ini dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan pembangunan perkebunan dan hortikultura selama 5 (lima) tahun dimulai pada tahun 2018 sampai tahun 2023 dengan maksud menyatukan gerak langkah seluruh unsur perkebunan dan hortikultura.